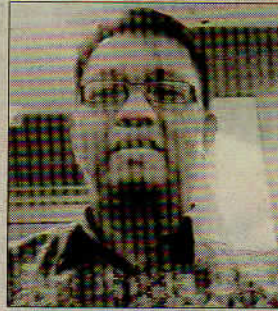


RPJMD Provinsi Gorontalo dan Fokus Pembangunan Perdesaan

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan dimaknai semata sebagai dokumen perencanaan pembangunan, didalamnya juga menggambarkan komitmen kepala daerah dalam menahkodai sebuah daerah, selain model kebijakan yang akan ditempuh berdasarkan kondisi riil daerah selama lima tahun kedepan. Singkatnya, RPJMD mendokumentasikan janji-janji politik kepala daerah, karena itu janji-janji politik sejatinya realistis dan terukur mudah dioperasionalkan oleh aparat pemerintah untuk mengatasi persoalan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dokumen RPJMD memuat banyak hal, salah satunya isu strategis, untuk bagian ini sedapat mungkin diuraikan secara faktual agar rumusan arah kebijakan pembangunan dapat menyelesaikan permasalahan mendasar bagi daerah tersebut.

banyak berada? Kelompok mana yang paling banyak menganggur? Apa faktor determinan mendorong peningkatan disparitas? Pemetaan ini penting agar menjadi lebih fokus menyelesaikan masalah, misalnya persoalan kemiskinan, di Gorontalo sendiri lokasi kemiskinan paling banyak ada dipedesaan. Maka dengan demikian arah kebijakan pembangunan diperkuat secara kewilayahan di pedesaan, untuk masalah pengangguran sekalipun tercermin bahwa angka pengangguran di Gorontalo terbilang rendah dibawah 5 persen. Tetapi jumlah pekerja produktif rendah, pengangguran musiman banyak ini tergambar dari kelompok pekerja di Gorontalo diatas 50 persen merupakan lulusan Sekolah Dasar, pada saat yang bersamaan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi terus bertambah, demikian halnya masalah disparitas distribusi pendapatan masyarakat tetap tinggi karena dipengaruhi struktur ekonomi.



Oleh
Muh. Amier Arham

dibandingkan sektor tersier, namun menjadi penyedia lapangan kerja paling besar, dari sisi pengeluaran didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga. Melihat sumber utama pertumbuhan ekonomi Gorontalo, tumbuhnya bisa tinggi tetapi efeknya relatif kecil, hal ini ditunjukkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Gorontalo tertinggi ketiga secara nasional namun angka kemiskinan cenderung stabil diangka 17 - 18 persen, kondisi serupa tingkat ketimpangan lebih tinggi dibandingkan secara nasional. Anomali seperti ini sebetulnya bukan hanya dialami oleh Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kondisi serupa malahan pertumbuhan ekonomi provinsi tetangga ini *double digit* dan tertinggi secara nasional tetapi problem kemiskinan juga tidak dapat ditekan secara signifikan.

Untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dukungan infrastruktur diperlukan, ditengah keterbatasan anggaran maka infrastruktur pedesaan perlu menjadi prioritas. Sedapat mungkin tidak mengedepankan infrastruktur yang bersifat mercusuar, sebab kurang memberikan efek jangka pendek terhadap penyelesaian kemiskinan pedesaan. Sementara itu menyangkut persoalan pengangguran, daya saing tenaga kerja perlu menjadi agenda prioritas dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, meskipun dari segi prosentase tidak terlalu tinggi tetapi tantangannya adalah makin meningkatnya angka pengangguran terdidik.

Salah satu aspek yang dapat menekan angka pengangguran terdidik dibutuhkan investasi swasta, sayangnya selama ini tingkat pertumbuhan investasi masuk ke Gorontalo terbatas, hal ini terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit lebih dari separuh untuk kredit konsumsi, kurang dari 20 persen untuk investasi. Oleh karena itu, jika diukur secara kasat mata pertumbuhan jumlah kendaraan di Gorontalo termasuk tinggi dan menjadi sumber utama PAD Provinsi Gorontalo.

kewilayahan nampak bahwa gubernur-wakil gubernur memiliki komitmen untuk menekan ketimpangan antar daerah. Hanya saja dalam implementasinya ini dipastikan akan memiliki kendala, sebab politik anggaran APBN dan APBD provinsi paling diuntungkan adalah Kota Gorontalo. Secara keseluruhan APBN plus APBD provinsi dan kabupaten/kota pembelanjaannya dilakukan di Kota Gorontalo, ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Maka arah kebijakan politik anggaran perlu dipertimbangkan dalam RPJMD, dalam hal ini pembangunan fisik terutama infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pedesaan diperkuat.

Sehingga asumsinya uang yang beredar diluar Kota Gorontalo makin meningkat, sekaligus menekan laju urbanisasi masyarakat pedesaan masuk ke Kota Gorontalo sebab beban fisik kota ini makin berat. Selain ketimpangan wilayah, ketimpangan distribusi pendapatan tak kalah pentingnya membutuhkan perhatian dan semestinya ini juga mendapatkan porsi perhatian dalam RPJMD Gorontalo. Ketimpangan distribusi pendapatan polanya mirip dengan angka kemiskinan yang cenderung stagnan kendati pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi dibandingkan secara nasional.

tidak sedikit isu strategis yang digambarkan dalam RPJMD lebih bersifat normatif, malahan sebagian daerah sekedar memindai dokumen daerah lain bukan didasarkan pada kondisi ril daerah. Pada akhirnya arah kebijakan yang dirumuskan tidak didasarkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi dalam membangun daerah. Maka menurut hemat saya penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo yang sedang difinalisasi, sedapat mungkin arah kebijakan pembangunan menitikberatkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo, terutama penurunan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran dan menekan disparitas distribusi pendapatan.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, jika itu menjadi kesepakatan sebagai problem pembangunan daerah, maka langkah selanjutnya perlu dipetakan ada dimana orang miskin paling

Untuk itu, RPJMD Provinsi Gorontalo tidak salah kalau penguatannya kearah permasalahan di atas. Sasaran pokok RPJMD selama ini lebih berorientasi bagaimana mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin dengan tidak mencermati sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Asumsinya makin tinggi pertumbuhan ekonomi dianggap sebuah keberhasilan, target pencapaian seperti ini tidak salah namun tidak memiliki arti apa-apa bilamana pertumbuhan ekonomi tidak memiliki efek yang kuat terhadap kinerja ekonomi makro lainnya.

Secara teoritik sumber pertumbuhan ekonomi ada dua pendekatan, yakni pendekatan produksi (nilai tambah) dari masing-masing sektor dan pendekatan pengeluaran. Untuk Gorontalo sumber pertumbuhan utamanya adalah sektor pertanian tetapi pertumbuhan sektor ini lebih lambat

Dengan demikian menjadi jelas bahwa problem ekonomi Gorontalo terletak pada sumber pertumbuhan ekonomi yang kurang memiliki elastisitas yang besar terhadap kemiskinan, pengangguran dan disparitas. Jika sektor pertanian tetap menjadi unggulan maka itu hilirisasi (penciptaan nilai tambah) produk pertanian menjadi penting, dalam bacaan saya agenda pembangunan ekonomi dalam draft RPJMD Gorontalo mencantumkan proses transformasi ekonomi, dengan mendorong transformasi ekonomi artinya ada kemauan menciptakan nilai tambah komoditas, ini langkah maju.

Kalaupun ada investasi yang masuk ke Gorontalo dalam pandangan saya yang terserap menjadi pekerja kebanyakan tamatan sekolah menengah kebawah. Itupun sebagian pelaku usaha mengeluhkan persoalan produktifitas tenaga kerja yang rendah, ditambah persoalan *attitude*.

Tidak sedikit investasi dan proyek dari luar yang masuk ke Gorontalo membawa serta tenaga kerjanya, karena pekerja di Gorontalo dianggap kurang produktif.

Dengan sendirinya investasi yang bersifat *labor intensive* sangat dibutuhkan, terutama yang memiliki *linkage* dengan input produk pertanian unggulan.

Persoalan ketimpangan juga penting mendapatkan perhatian dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, secara

Artinya bahwa sekalipun ekonomi mengalami pertumbuhan tetapi efeknya terhadap penurunan kemiskinan dan menekan ketimpangan korelasinya lemah, idealnya pertumbuhan ekonomi meningkat kemiskinan menurun, dan ketimpangan terkoreksi. Kenapa terjadi seperti ini, karena struktur ekonomi Gorontalo ada yang salah, ia membutuhkan perbaikan lewat perencanaan yang pas, dan pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih produktif.

***Pengajar Fakultas
Ekonomi UNG**